

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PERJALANAN DINAS

LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR :

Dasar :

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :
: 2. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Ditetapkan di
pada tanggal

Pejabat yang berwenang

(_____ N A M A _____)
NIP

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. M. ZAINUL MAJDI

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PERJALANAN DINAS

LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Lembar ke : 1, 2
Kode No. :
Nomor :

**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)**

1. Pejabat yang memberi perintah	
2. Nama Pegawai yang diperintah	
3. a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat b. Tujuan	
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
8. Pengikut	
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	
10. Keterangan Lain-lain	

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

Pejabat yang berwenang

(_____ N A M A _____)
NIP

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI

SPPD No. :
Berangkat dari :
Pada tanggal :
Ke :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(N A M A)

II. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala Pada tanggal :
Kepala

III. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala Pada tanggal :
Kepala

IV. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala Pada tanggal :
Kepala

V. Tiba kembali di : Telah diperiksa, dengan keterangan
Pada tanggal : bahwa perjalanan tersebut diatas
benar dilakukan atas perintahnya
dan semata-mata untuk kepentingan
jabatan dalam waktu yang sesingkat-
singkatnya.

Pejabat yang berwenang

(N A M A)
NIP

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR TAHUN 2015
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
 Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
	JUMLAH :	Rp	
	Terbilang		

Telah dibayar sejumlah tanggal, bulan, tahun
 Rp Telah menerima jumlah uang sebesar
 Rp

Bendahara Pengeluaran

Yang Menerima

(.....)

(.....)

NIP

NIP

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp
 Yang telah dibayar semula : Rp
 Sisa kurang/lebih : Rp

Pejabat Yang Berwenang

(_____ N A M A _____)
 NIP

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. M. ZAINUL MAJDI

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PERJALANAN DINAS

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor Tanggal,
dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dilakukan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/ Menyetujui:
Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

....., tanggal, bulan, tahun
Pelaksana SPPD,

.....
NIP

.....
NIP

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,


H. M. ZAINUL MAJDI

LAMPIRAN V
 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR TAHUN 2015
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS

FASILITAS TRANSPOR BAGI PELAKSANA SPPD

NO	URAIAN	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/ BUS	LAINNYA
1	2	4	5	6	7
1	Pejabat Negara/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah	Bisnis	VIP / Kelas I A	Spesial / Eksekutif	<i>riil cost</i>
2	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	Ekonomi	Kelas I A	Eksekutif	<i>riil cost</i>
4	Pejabat Eselon III/Golongan IV	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	<i>riil cost</i>
5	Pejabat Eselon IV/Golongan III/Tokoh Masyarakat	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	<i>riil cost</i>
6	Golongan II/Golongan I/Pegawai Tidak Tetap dan Anggota Masyarakat	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	<i>riil cost</i>

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. M. ZAINUL MAJDI

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2015
TANTANG
PERJALANAN DINAS

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN/PENUNDAAN TUGAS PERJALANAN DINAS

NOMOR

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : (1)
NIP : (2)
Jabatan : (3)
Unit Kerja : (4)
SKPD : (5)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas atas nama :

Nama : (6)
NIP : (7)
Jabatan : (8)
Unit Kerja : (9)
SKPD : (10)

Pembatalan/penundaan perjalanan dinas dilakukan dalam keadaan darurat/
perintah Gubernur/ perintah pejabat yang berwenang menerbitkan SPT dan SPPD yaitu
.....(11).....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat
digantikan oleh Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian
hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan
bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....(12)
Yang Membuat Pernyataan

.....(13)

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. M. ZAINUL MAJDI

LAMPIRAN VII
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PERJALANAN DINAS

**SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : (1)
NIP : (2)
Jabatan : (3)
Unit Kerja : (4)
SKPD : (5)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: tanggal dan SPPD Nomor tanggal atas nama:

Nama : (6)
NIP : (7)
Jabatan : (8)
Unit Kerja : (9)
SKPD : (10)

Dibatalakan sesuai dengan Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Nomor tanggal

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa(11)..... dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA-SKPD tidak dapat dikembalikan/ *refund* (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp.(12)....., sehingga dibebankan pada DPA-SKPD Nomor: tanggal Unit Kerja(13)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian Daerah tersebut ke Kas Daerah.

.....(14)

Yang Membuat Pernyataan

.....(15)

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. M. ZAINUL MAJDI